

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Hakikat pembangunan yaitu individu-individu otonom atau manusia-manusia, dimana mereka dapat mengaktualisasi segala bentuk potensi yang dimilikinya secara optimal. Dari sinilah muncul berbagai macam dan spesialisasi sehingga dapat menyuburkan pertukaran (*exchange*) atau transaksi. Dalam hal ini akan menjadikan suatu landasan kokoh bagi terbentuknya suatu masyarakat yang unggul dan dapat bersaing di dunia global. Transaksi tersebut tidak lain adalah suatu keberagaman dan kelebihan interaksi antar manusia dengan kata lain hasil dari interaksi sosial tersebut yaitu kesejahteraan sosial (*social welfare*) sebagaimana yang dijanjikan pada prinsip keunggulan komparatif (*comparative and vantage*) (Sudarwati, 2009).

Suatu pembangunan nasional di sebuah negara atau wilayah bisa dikatakan berhasil apabila negara tersebut bisa menyelesaikan masalah-masalah ekonomi dan sosial masyarakatnya, salah satunya yaitu upaya dalam pengentasan kemiskinan. Kemiskinan merupakan masalah yang masih dialami diberbagai negara belahan dunia, khususnya negara Indonesia dan wilayah-wilayah yang ada di negara ini.

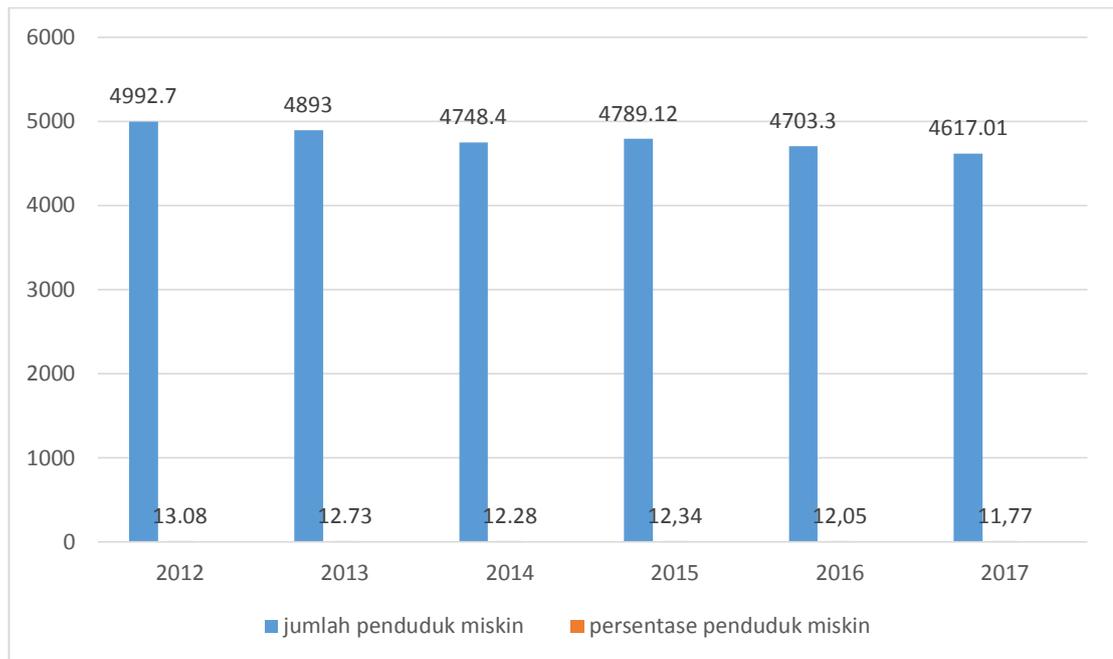
Dalam upaya pengentasan kemiskinan tidak boleh hanya terpaku terhadap terhadap kepala keluarga yang kebetulan miskin, akan tetapi juga harus diarahkan terhadap anak-anak mereka yang kurang mampu dalam modal bersekolah baik dalam pendidikan dasar, menengah maupun mereka yang

berhasil meraih pendidikan yang lebih tinggi. Anak-anak mereka tersebut harus dibantu pemberdayaannya agar lebih gigih karena kemungkinan besar dalam hal pemberdayaan terhadap anak-anak mereka melalui pendidikan ini dapat mencegah terhadap bertambahnya atau tumbuhnya keluarga miskin baru. (Suyono, 2003: 96-97)

Negara berkembang pada dasarnya sangatlah sulit untuk maju dikarenakan terdapat faktor kesamaan karakteristik pada tingkat pendapatan nasional yang lebih rendah sekaligus laju pertumbuhan ekonomi lambat.

Masalah kemiskinan merupakan suatu permasalahan sosial yang sangat luas dan harus ditangani dengan cepat supaya bisa terselesaikan dan dioptimalkan. Negara republik Indonesia sebagai negara yang masih berkembang dan memiliki jumlah penduduk kurang lebih 260 juta jiwa tidak dapat terhindar dari masalah kemiskinan tersebut. Hal ini dapat diartikan bahwa jumlah penduduk miskin yang banyak serta masih banyak yang tertinggal baik dari segi teknologi khususnya di daerah pedesaan yang masih sulit terjangkau untuk akses ke kota.

Salah satunya yaitu masih banyak tingkat kemiskinan di Kabupaten maupun Kota yang terdapat pada Provinsi Jawa Timur. Berikut perkembangan tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Timur pada periode 2012-2017 yang di tunjukkan pada grafik 1.1. Tingkat kemiskinan terdiri dari besaran jumlah dan persentase dari penduduk miskin.



Sumber: BPS Jatim

**Gambar 1. 1**  
**Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Jawa Timur periode 2012-2017**

Pada grafik diatas dijelaskan bahwa tingkat kemiskinan di provinsi Jawa Timur berdasarkan persentase pada tahun 2013 mengalami penurunan sebesar 12,73 persen dari tahun sebelumnya senilai 13,08 persen. Kemudian pada tahun berikutnya yaitu 2014 mengalami penurunan 12,28 persen dan pada tahun 2015 turun 12,34 ,kemudian pada tahun 2016 mengalami penurunan lagi di angka 12,05 persen dan di tahun 2017 menurun di angka 11,77 persen. Turunnya tingkat kemiskinan ini tidak di imbangi dengan tingkat pemerataan pendapatan yang baik,hal ini disebabkan kurangnya lapangan pekerjaan serta masih tingginya tingkat pengangguran di provinsi Jawa Timur. Masalah ketimpangan pendapatan tidak lepas dari permasalahan kemiskinan dikarenakan masalah ini memang harus dihadapi serta diatasi dan tidak hanya

di satu negara akan tetapi banyak negara yang masih mengalami masalah serupa.

Jadi pada tahun 2017 presentase penduduk miskin provinsi Jawa Timur tingkat kemiskinannya masih diatas rata-rata kemiskinan Indonesia, yaitu kurang dari 0,15 % , dan Provinsi Jawa Timur menduduki peringkat ke 13 dari 34 Provinsi yang terdapat di Indonesia. Kemudian di Pulau Jawa tingkat kemiskinan Jawa Timur menduduki peringkat ke 3 lebih bagus dari provinsi Jawa Tengah dan Provinsi DIY. (BPS, 2018)

Maka dari itu untuk mencegah kesenjangan pendapatan seharusnya pemerintah lebih melihat lagi dalam memecahkan pengentasan kemiskinan disisi lain seperti halnya melihat kualitas pembangunan pendidikan yang dimana masalah pendidikan ini sangatlah penting bagi masyarakat di negara tersebut. Masalah pendidikan juga menjadi suatu tolak ukur apakah negara tersebut maju atau berkembang.

Terdapat banyak faktor yang di duga mempengaruhi tingkat kemiskinan seperti halnya upah minimum, jumlah penduduk, dan juga produk domestik regional bruto.

Upah merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat pengangguran yang berdampak pada tingkat kemiskinan. Upah merupakan kompensasi yang diterima oleh satu unit tenaga kerja yang berupa jumlah uang yang dibayarkan kepadanya. (Gregory Mankiw 2006 dalam Reggi 2016)

Penetapan tingkat upah yang dilakukan pemerintah pada suatu wilayah akan memberikan pengaruh terhadap besarnya tingkat pengangguran yang ada.

Semakin tinggi besarnya upah yang ditetapkan pemerintah maka hal tersebut akan berakibat pada penurunan jumlah orang yang bekerja pada negara tersebut. Oleh karena itu semakin tinggi upah yang ditetapkan akan membawa pengaruh pada tingkat pengangguran yang terjadi (Kaufman pada Reggi 2016).

Disisi lain juga kebijakan Upah Minimum merupakan suatu masalah yang tidak ada habisnya didalam sumber perdepatan politik. Para pendukung upah minimum yang lebih tinggi memandangnya sebagai sarana meningkatkan pendapatan para pekerja yang miskin. Akan tetapi para penentang diberlakunya upah minimum lebih tinggi ini mengklaim hal tersebut tidaklah cara yang baik untuk membantu orang-orang miskin. Mereka berpendapat bahwa hal itu salah sasaran, karena yang diperoleh banyak dari pekerja kelas remaja atau penganggur yang masih mencari tambahan uang saku, dan bukan kepala keluarga atau kepala rumah tangga yang harus bekerja untuk menghidupi keluarganya (Gregory Mankiw, 2006:162). Di provinsi Jawa Timur tingkat upah mengalami kenaikan setiap tahunnya sebagai berikut dijelaskan dalam tabel 1.1 :

**Tabel 1. 1**  
Tingkat Upah Minimum Provinsi Jawa Timur Periode 2012-2017

Tahun	Upah (Rupiah)	Persentase (%)
2012	933.128	10,49 %
2013	1.139.730	13,92 %
2014	1.314.942	13,38 %
2015	1.547.386	8,14 %
2016	1.729.158	8,04 %
2017	1.871.813	8,68 %

Sumber Disnakertrans JATIM

Berdasarkan pada tabel 1.1 menunjukkan dampak positif setiap tahunnya seperti pada tabel diatas dimana jumlah upah minimum Provinsi Jawa Timur

selalu mengalami kenaikan setiap tahunnya yaitu pada tahun 2012 sebesar Rp 933.128 dengan persentase sebesar 10,49 %, pada tahun 2013 sebesar Rp 1.139.173 dengan persentase sebesar 13,92 %, pada tahun 2014 juga mengalami kenaikan sebesar Rp 1.314.942 dengan persentase sebesar 13,38 %, pada tahun 2015 mengalami kenaikan sebesar Rp 1.547.386 dengan persentase sebesar 8,14 %, tahun 2016 mengalami kenaikan sebesar Rp 1.729.158 dengan persentase sebesar 8,04 %, dan tahun 2017 juga mengalami kenaikan sebesar Rp 1.871.813 dengan persentase sebesar 8,68 %. Hal tersebut menunjukkan hal yang positif dimana setiap tahunnya upah minimum di Provinsi Jawa Timur selalu mengalami kenaikan dimana hal tersebut sangat berpengaruh terhadap pendapatan dan daya konsumsi masyarakat.

Disisi lain terdapat juga faktor yang dapat memengaruhi kemiskinan suatu wilayah yaitu pertumbuhan penduduk pada negara terbelakang, berkembang, berbeda dengan negara maju. Pada proses pembangunan tidaklah sama, mengapa ? karena ekonomi pada negara terbelakang tergolong miskin sedangkan pada negara maju itu bagus. Di negara berkembang modalnya kurang akan tetapi disisi lain pekerja atau buruh melimpah. Oleh karena itu pertumbuhan penduduk dianggap sebagai penghambat pada pembangunan ekonomi. Pertumbuhan yang cepat akan mengakibatkan tekanan terhadap lahan pekerjaan sehingga banyaknya pengangguran. (Jhingan, 2016 : 405)

Berdasarkan tabel 1.2 bahwa jumlah penduduk pada Provinsi Jawa Timur di tahun 2012 hingga 2017 bergerak dan tergolong naik dari tahun ke tahun.

Berikut adalah jumlah penduduk dari total 38 kabupaten/kota di provinsi Jawa Timur periode 2012-2017 yang tercantum pada tabel 1.2 :

**Tabel 1. 2**  
Jumlah Penduduk berdasarkan jenis kelamin Provinsi Jawa Timur Periode 2012-2017

Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)
2012	38.106.590
2013	38.363.195
2014	38.610.202
2015	38.847.561
2016	39.075.152
2017	39.292.971

Sumber : BPS Jatim

Tingkat kemiskinan suatu wilayah tidak terlepas dari kurangnya wadah atau lapangan pekerjaan di kalangan masyarakat sekitar. Begitupun dengan penyerapan tenaga kerja yang belum sebanding dengan jumlah usia produktif di kalangan masyarakat. Hal demikianlah menjadi dilema di kalangan masyarakat sekitar beserta para pemimpin-pemimpin daerahnya. Memang setiap tahunnya jumlah lapangan pekerjaan bertambah jumlahnya akan tetapi disisi lain jumlah angkatan kerja juga terus meningkat, disinilah terjadinya permasalahan sehingga disamping itu pula terjadi tingkat kemiskinan yang cukup tinggi karena banyak dari mereka di usia produktif masih belum memiliki suatu pekerjaan tertentu.

Provinsi Jawa Timur adalah salah satu provinsi dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang termasuk tinggi di Indonesia, oleh karena itu melihat dari besarnya suatu kegiatan ekonomi yang disebabkan atas tingginya arus perdagangan barang/jasa yang memiliki peranan penting didalam transaksi-transaksi perekonomian di Provinsi Jawa Timur. Berikut data Produk

Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan pada perekonomian provinsi Jawa Timur tahun 2012 hingga 2017 dilihat pada tabel 1.3 berikut ini :

**Tabel 1. 3**  
**Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan**  
**2010 Provinsi Jawa Timur Periode 2012-2017**

Tahun	PDRB (Rp)	Persentase (%)
2012	1.124.464.600.000.000	6,00 %
2013	1.192.789.800.000.000	6,07 %
2014	1.262.684.500.000.000	5,85 %
2015	1.331.376.000.000.000	5,44 %
2016	1.405.561.000.000.000	5,57 %
2017	1.482.147.600.000.000	5,44 %

Sumber : BPS Jatim

Berdasarkan pada tabel 1.3 diatas menunjukkan bahwa produk domestik regional bruto (PDRB) atas dasar harga konstan pada tahun 2010 pada Provinsi Jawa Timur periode 2012 -2017 yang mengalami kenaikan secara terus menerus dimana pada tahun 2012 sebesar Rp 1.124.464.600.000 dengan persentase sebesar 6,00 % , ditahun 2013 mengalami kenaikan sebesar Rp 1.192.789.800.000.000 dengan persentase sebesar 6,07%, di tahun 2014 1.262.684.500.000 dengan persentase sebesar 5,85%, 2015 mengalami kenaikan sebesar Rp 1.331.376.000.000.000 dengan persentase sebesar 5,44%, pada tahun 2016 mengalami kenaikan sebesar Rp 1.405.561.000.000.000 dengan persentase sebesar 5,57 % dan di tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar Rp 1.482.147.600.000.000 dengan persentase sebesar 5,44 %. PDRB Provinsi Jawa timur selalu mengalami kenaikan dengan harga konstan dimana hal tersebut sangat mempengaruhi perekonomian masyarakat dan perekonomian daerah mengalami kenaikan secara terus menerus.

Alasan peneliti mengambil tema penelitian di Provinsi Jawa Timur dikarenakan banyaknya jumlah penduduk di Provinsi Jawa Timur serta masih tingginya tingkat kemiskinannya, dan juga masih menjadi persoalan penting bagi pemerintah untuk mengatasi permasalahan kemiskinan ini. Guna mengatasi permasalahan tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Timur maka faktor-faktor apa saja yang diduga mempengaruhinya. Agar menjadi suatu kebijakan kedepannya yang lebih efisien dalam mengatasi masalah kemiskinan tersebut. Faktor-faktor yang diduga mempengaruhi tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut : (1) Upah Minimum Kabupaten/Kota, (2) Jumlah Penduduk, dan (3) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

#### **B. Batasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah di bahas peneliti diatas bahwa peneliti mempunyai ruang lingkup penelitian sebagai berikut :

1. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan dengan menurunkan beberapa faktor yang mempengaruhinya yaitu variabel berikut Upah Minimum, Jumlah Penduduk, dan PDRB
2. Penelitian ini dilakukan dalam 38 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur yang terdiri dari 29 Kabupaten serta 9 Kota.
3. Penelitian ini selama periode 2012 hingga 2017

#### **C. Rumusan Masalah**

Peneliti mengangkat penelitian tentang pengaruh Upah Minimum, Jumlah Penduduk, dan PDRB di Provinsi Jawa Timur untuk mengatasi tingkat kemiskinan.

Dalam pernyataan diatas timbulah beberapa pertanyaan antara lain

1. Bagaimana pengaruh Upah Minimum terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Timur
2. Bagaimana pengaruh Jumlah Penduduk terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Timur
3. Bagaimana pengaruh PDRB terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Timur

#### **D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

##### **Tujuan**

1. Untuk mengetahui pengaruh Upah Minimum terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Timur
2. Untuk mengetahui pengaruh Jumlah Penduduk terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Timur
3. Untuk mengetahui pengaruh PDRB terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Timur

##### **Kegunaan**

Berharap penelitian ini berguna dan bermanfaat bagi :

1. Pemerintah, agar supaya dapat diambil dan dibuat acuan kebijakan-kebijakan kedepannya serta digunakan pertimbangan dalam mengatasi kemiskinan
2. Masyarakat, agar dapat menambah wawasan tentang perekonomian dan wawasan sosial
3. Mahasiswa, agar dapat diambil sebagai acuan atau referensi bagi mahasiswa untuk kajian dan ketika melakukan penelitian serupa.